

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Kamil (2014) dalam jurnal penelitiannya tentang Pengaruh Manajemen Laba terhadap Nilai perusahaan dengan mekanisme *Corporate Governance* sebagai Variable Pemoderasi periode 2010-2012 menyimpulkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah koefisien regresi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba dapat menurunkan nilai perusahaan sedangkan dengan adanya Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hermuningsih (2013) dalam jurnal penelitiannya tentang Pengaruh Profitabilitas, *Growth opportunity*, struktur Modal terhadap nilai Perusahaan Pada Perusahaan Publik di Indonesia periode 2006-2010 menyimpulkan bahwa variabel Profitabilitas, *Growth Opportunity* dan Struktur Modal, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Ini berarti, semakin besar Profitabilitas, semakin tinggi peluang pertumbuhan, dan semakin besar proporsi hutang dalam struktur pendanaan perusahaan, maka semakin besar pula Nilai Perusahaan tersebut.

David T dan R. Wilopo (2011) membuktikan bahwa *GCG* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan dengan semakin baiknya penerapan *GCG* maka akan makin meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Kristanti dan Priyadi (2016) dalam jurnal penelitiannya tentang pengaruh *Good Corporate Governance* sebagai pemoderasi hubungan Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan periode 2014 – 2016, menyatakan bahwa tindakan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, *GCG* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan.

Lestari (2013) dalam penelitiannya tentang pengaruh *Earnings Management*

terhadap Nilai Perusahaan dimoderasi dengan praktik *Corporate Governance* menyatakan bahwa Manajemen Laba memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang melakukan manajemen laba yang tinggi dapat membuat Nilai Perusahaan menjadi lebih rendah dengan hasil pengujian membuktikan variabel *Corporate Governance* tidak keseluruhan berpengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap Nilai Perusahaan.

Sylvie Berthelot. et al (2009) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* menerapkan sistem tertentu yang terkait dengan hasil akuntansi yang lebih baik, yang diperhitungkan oleh investor.

Silveira & Bairos (2013) menemukan bahwa adanya pengaruh kualitas *corporate governance* yang positif dan signifikan terhadap Nilai Pasar Perusahaan.

2.2 Teori Agensi

2.3.1 Definisi Teori Agensi

Hubungan antara para pemegang saham dan manajemen disebut sebagai hubungan keagenan (*agency relationship*). Hubungan seperti ini terjadi ketika seseorang (pemilik) mempekerjakan orang lain (agen) untuk mewakili kepentingannya. Dalam semua hubungan seperti ini, terdapat kemungkinan adanya konflik kepentingan diantara prinsipal dan agen. Konflik seperti ini disebut masalah keagenan (*agency problem*). (Ross, 2009 :15)

Scott (2000:214) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Kontrak kerja yang dimaksud dalam penulisan ini adalah kontrak kerja antara pemilik modal dengan manajer perusahaan. Dimana antara *agent* dan *pricipal* ingin memaksimalkan *utility* masing-masing dengan informasi yang dimiliki. Tetapi disatu sisi, *agent* memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibanding dengan *principal* disisi lain, sehingga menimbulkan adanya *asimetry information* yang menyebabkan konflik kepentingan.

Teori keagenan menurut Anthony dan Govindarajan (2011:10) adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent*

untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan *CEO (Chief Executive Officer)* sebagai *agent* mereka. Pemegang saham mempekerjakan *CEO* untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Sebuah kontrak antara *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajer/pengelola) yang mana baik pemilik dan pengelola merupakan pemaksimalan kesejahteraan. Pemisahan ini dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problems*) antara pemilik dan manajer yang mungkin saja pengelola tidak bertindak yang baik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of Interest*).

2.3 Nilai perusahaan

2.3.1 Definisi Nilai Perusahaan

Menurut Agus (2010:487), nilai Perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi. Adanya kelebihan nilai jual diatas nilai likuidasi adalah nilai dari organisasi manajemen yang menjalankan perusahaan itu.

Menurut Noerirawan (2012), nilai Perusahaan merupakan kondisi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini.

2.3.2 Jenis Nilai Perusahaan

Menurut Yulius dan Tarigan (2007: 3), mengatakan bahwa terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan, yaitu:

a. Nilai Nominal

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif.

b. Nilai Pasar

Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar

menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.

c. Nilai Intrinsik

Nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak, karena mengacu kepada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.

d. Nilai Buku

Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antar total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar.

e. Nilai Likuidasi

Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.

2.3.3 Pengukuran Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian. Menurut Sudana (2011:23), rasio Penilaian adalah suatu rasio yang terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal (*go public*).

Rasio penilaian memberikan informasi seberapa besar masyarakat menghargai perusahaan, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli saham dengan harga yang lebih tinggi dibanding nilai bukunya. Berikut ini beberapa metode yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan.

1. *Price Earning Ratio (PER)*

Price earning ratio (PER) menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang rela dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap dolar laba yang dilaporkan (Brigham dan Houston, 2006:110). Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan

keuntungan yang diperoleh oleh para pemegang saham.

Kegunaan *price earning ratio* adalah untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh *earning per share* nya. *Price earning ratio* menunjukkan hubungan antara pasar saham biasa dengan *earning per share*. *Price earning ratio (PER)* berfungsi untuk mengukur perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar *PER*, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan Nilai Perusahaan.

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur *Price earning ratio (PER)* adalah sebagai berikut:

$$PER = \frac{\text{Market price per share}}{\text{Earning per share}}$$

2. *Price to Book Value (PBV)*

Price to Book Value (PBV) adalah rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan *overvalued* (di atas) atau *undervalued* (di bawah) nilai buku saham tersebut (Fakhruddin dan Hadianto, 2001).

Price to Book Value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. *PBV* juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan Nilai Perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan.

Untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio ini mencapai diatas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Semakin besar rasio *PBV* semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah ditanamkan di perusahaan.

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur *Price to Book Value (PBV)* adalah sebagai berikut:

$$PBV = \frac{\text{Market price per share}}{\text{Book Value per Share}}$$

3. Tobin's Q

Alternatif lain yang digunakan dalam mengukur Nilai Perusahaan adalah dengan menggunakan metode Tobin's Q yang dikembangkan oleh James Tobin. Tobin's Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan (Weston dan Copeland, 2001). Rasio Q lebih unggul daripada rasio nilai pasar terhadap nilai buku karena rasio ini fokus pada berapa nilai perusahaan saat ini secara relatif terhadap berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggantinya saat ini.

Adapun rumus Tobin's Q adalah sebagai berikut:

$$Q = \frac{(EMV + D)}{(EBV + D)}$$

Keterangan:

- Q = Nilai perusahaan
- EMV = Nilai pasar ekuitas
- EBV = Nilai buku dari total aktiva
- D = Nilai buku dari total hutang

EMV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan pada akhir tahun (*closing price*) dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun sedangkan EBV diperoleh dari selisih total asset perusahaan dengan total kewajibannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Price earnings ratio (PER)* untuk mengukur perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar *PER*, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur *Price earnings ratio (PER)* adalah sebagai berikut:

$$PER = \frac{\text{Market price per share}}{\text{Earnings per share}}$$

2.4 *Earnings Management*

Definisi Earnings Management

(Subramanyam, 2014:130) Manajemen laba merupakan hasil akuntansi akrual yang paling bermasalah. Penggunaan dan estimasi dalam akuntansi akrual mengizinkan manajer untuk menggunakan informasi dalam dan pengalaman mereka untuk menambah kegunaan angka akuntansi. Namun, beberapa manajer menggunakan kebebasan ini untuk mengubah angka akuntansi, terutama laba, untuk keuntungan pribadi, sehingga mengurangi kualitasnya. Manajemen laba terjadi karena beberapa alasan, seperti meningkatkan kompensasi, menghindari persyaratan utang, memenuhi ramalan analis, dan memengaruhi harga saham. Manajemen laba dapat dilakukan melalui dua cara : (1) mengubah metode akuntansi, yang merupakan bentuk manajemen laba yang paling jelas terlihat, dan (2) mengubah estimasi dan kebijakan akuntansi yang menentukan angka akuntansi, suatu bentuk manajemen laba yang lebih samar .

Menurut Scott (1997) *Earnings Management* adalah intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba, di mana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metoda akuntansi, membuat kebijakan-kebijakan (*discretionary*) yang dapat mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan, agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan.

Strategi Earnings Management

Terdapat tiga jenis strategi manajemen laba menurut Subramanyam (2014) :

a. Manajer meningkatkan laba (*increasing income*)

Salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode. Pada skenario pertumbuhan, akrual pembalik lebih kecil dibandingkan akrual kini, sehingga dapat meningkatkan laba.

- b. Manajer melakukan “mandi besar” (*big bath*) melalui pengurangan laba periode ini.

Strategi *big bath* dilakukan melalui penghapusan (*write-off*) sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk (sering kali pada masa resesi di mana perusahaan lain juga melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang tidak bisa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Strategi *big bath* sering kali dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya. Oleh karena sifat *big bath* yang tidak biasa dan tidak berulang, pemakai cenderung tidak memperhatikan dampak keuangannya. Hal ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan laba di masa depan.

- c. Manajer mengurangi fluktuasi laba dengan peralatan laba (*income smoothing*)
Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini, manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan atau “baik” laba dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk. Banyak perusahaan menggunakan bentuk manajemen laba ini.

Motivasi *Earnings Management*

Subramanyam (2014:132) banyak alasan untuk melakukan manajemen laba, termasuk meningkatkan kompensasi manajer yang terkait dengan laba yang dilaporkan, meningkatkan harga saham, dan usaha mendapatkan subsidi pemerintah. Insentif utama untuk melakukan manajemen laba dibahas sebagai berikut :

- a. Insentif Perjanjian

Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi. Misalnya perjanjian kompensasi manajer biasanya mencakup bonus berdasarkan laba. Perjanjian bonus biasanya memiliki batas atas dan bawah, artinya manajer tidak mendapat bonus jika laba lebih rendah dari batas bawah dan tidak mendapatkan bonus tambahan saat laba lebih tinggi dari batas atas. Hal ini berarti manajer memiliki insentif untuk meningkatkan atau mengurangi laba

berdasarkan tingkat laba yang belum diubah terkait dengan batas atas dan bawah ini. Juga laba yang belum diubah berada diatas batas atas dan bawah, manajer memiliki insentif untuk meningkatkan laba. Saat laba lebih tinggi dari batas atas atau lebih rendah dari batas bawah, manajer memiliki insentif untuk menurunkan laba dan membuat cadangan untuk bonus masa depan.

b. Dampak harga saham

Insentif manajemen laba lainnya adalah potensi dampak terhadap harga saham. Misalnya, manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga saham perusahaan sementara sepanjang satu kejadian tertentu seperti merger yang akan dilakukan atau penawaran surat berharga, atau rencana untuk menjual saham atau melakukan opsi. Manajer juga melakukan perataan laba untuk menurunkan persepsi pasar akan risiko dan menurunkan biaya modal. malakukan perataan laba untuk menurunkan persepsi pasar akan resiko dan menurunkan biaya modal. Manajemen menurunkan ekspektasi pasar melalui pengungkapan sukarela yang pesimis (sebelum pengumuman) kemudian meningkatkan laba untuk melampaui ekspektasi pasar. Makin pentingnya investor sementara dan kemampuan investor ini untuk menghukum saham yang tidak memenuhi ekspektasi telah menimbulkan tekanan baru pada manajer untuk melakukan segala cara guna melampaui ekspektasi pasar.

c. Insentif lain

Laba sering kali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian yang dilakukan badan pemerintah, misalnya untuk ketaatan undang-undang antimonopoli dan IRS. Selain itu, perusahaan dapat menurunkan laba untuk memperoleh keuntungan dari pemerintah, misalnya subsidi atau proteksi dari persaingan asing. Perusahaan juga menurunkan laba untuk mengelakkan permintaan serikat buruh.

Selain tiga hipotesis diatas, Sulistyanto (2008) juga mengungkapkan ada motivasi lain yang mendasari perilaku manajemen laba, antara lain sebagai berikut:

a. Motivasi pasar modal

Dalam teori manajemen modern dijelaskan pentingnya pemisahan dan kepemilikan perusahaan. Tujuannya, agar perusahaan dikelola secara profesional oleh orang yang memahami bagaimana menjalankan sebuah perusahaan dengan baik. Pemilik membutuhkan bantuan orang lain yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi yang seharusnya dilakukannya. Tuntutan pemisahan kepemilikan dan pengelolaan ini semakin kencang untuk perusahaan publik atau perusahaan yang telah melepaskan sebagian sahamnya ke publik, sebab dalam perusahaan publik tidak ada lagi pemilik tunggal. Sebagai perusahaan dengan kepemilikan terbuka maka kepemilikan dibagi-bagi untuk siapapun yang memegang saham perusahaan bersangkutan. Setiap pemegang saham menjadi mempunyai hak suara untuk menentukan siapa yang harus mengelola dan membuat kebijakan dasar perusahaan.

Ada alasan penting mengapa pemegang saham mayoritas tidak menjalankan perusahaan secara langsung. Sebagai perusahaan dengan kepemilikan terbuka, maka integritas dan kredibilitas perusahaan merupakan kunci utama diterima tidaknya saham perusahaan itu oleh publik. Penilaian ini juga mencakup apakah perusahaan telah dikelola mengikuti kaidah-kaidah bisnis atau tidak, termasuk apakah perusahaan dikelola oleh orang-orang yang hanya mewakili kepentingan pemegang saham mayoritas atau tidak. Publik cenderung akan memilih perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh para profesional yang integritas dan kredibilitas telah teruji.

Inilah yang mengakibatkan pemegang saham mayoritas menyerahkan pengelolaan perusahaan ke pihak lain. Meski pemegang saham ini tetap bisa memengaruhi dan mengintervensi keputusan dan kebijakan manajerial perusahaan. Secara konseptual, pemisahan ini mendorong terjadinya asimetri informasi antara manajer perusahaan dengan pihak eksternal yang tidak mempunyai akses dan sumber informasi yang memadai. Sebagai pihak yang menguasai informasi lebih banyak dibandingkan dengan pihak

lain, manajer akan berperilaku oportunitas, yaitu mendahulukan kepentingan pribadinya diatas kepentingan pihak lain.

Kewajiban manajer sebagai pengelola perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi mengenai apa yang dilakukan dan dialaminya kedalam laporan keuangan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Laporan keuangan yang seharusnya menginformasikan nilai dan kondisi fundamental perusahaan, malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini dilakukan dengan menyembunyikan, menunda pengungkapan, atau mengubah informasi fundamental menjadi informasi palsu pada saat perusahaan akan melakukan suatu transaksi tertentu.

b. Penawaran saham perdana

Penawaran saham perdana atau *initial public offerings (IPO)* merupakan penawaran saham suatu perusahaan private untuk pertama kalinya kepada publik. Sebagai perusahaan private maka seluruh kepemilikan perusahaan itu dimiliki dan dikuasai oleh orang, keluarga atau kelompok tertentu, sehingga perusahaan semacam ini seringkali disebut sebagai perusahaan keluarga atau perusahaan tertutup.

Perusahaan cenderung menginformasikan hal-hal yang positif agar investor juga secara positif merespon saham yang ditawarkan. Manajer akan menyembunyikan, menunda atau mengubah informasi yang dapat membuat investor mempunyai persepsi negatif terhadap perusahaan sebab hal ini akan mengakibatkan harga saham perusahaan bersangkutan jatuh.

Inilah sebabnya mengapa manajer melakukan manajemen laba pada saat penawaran saham perdana. Meski perusahaan mempunyai keleluasaan untuk merekayasa informasi-informasi yang disampaikannya kepada publik, upaya ini tidak mungkin dilakukan secara terus menerus. Sebagai sebuah informasi mengenai kinerja yang berisi angka - angka akuntansi maka upaya untuk menyembunyikan, menunda atau memalsukan informasi sebenarnya hanyalah merupakan upaya untuk mengundur pengakuan atau pencatatan suatu transaksi atau peristiwa. Atau dengan kata lain, upaya-upaya seperti ini hanyalah permainan diatas kertas belaka.

c. Motivasi kontraktual

Profesionalisme pengelolaan perusahaan akan muncul seandainya setiap pihak menjalankan perannya masing-masing tanpa mengintervensi kepentingan pihak lain. Sebaliknya, permasalahan agensi akan muncul seandainya ada pihak yang mendahulukan kepentingan pribadi dengan mengintervensi pihak lain. Permasalahan inilah yang memicu konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan.

Manajer cenderung selalu berusaha memaksimalkan kepentingan pribadinya dari hubungan bisnis yang dijalin dengan pihak lain. Hubungan bisnis yang seharusnya dijalin dengan dasar saling menguntungkan semua pihak malah dimanfaatkan manajer untuk mencari kepentingan serta keuntungan pribadi. Upaya mencari keuntungan pribadi ini bisa dilakukan manajer sebab kesuperiorannya dalam menguasai informasi mengenai perusahaan dibandingkan dengan pihak lain. Sebagai pengelola perusahaan, manajer mengetahui dan menguasai seluruh informasi mengenai perusahaan, baik informasi bagus maupun buruk. Hal ini mendorong manajer bersikap oportunitas dengan hanya mempublikasikan informasi-informasi yang memberi manfaat bagi dirinya.

Informasi yang kurang menguntungkan bagi dirinya jika diketahui orang lain tidak akan dipublikasikan kepada publik. Hingga manajer akan memilih mana informasi yang harus disembunyikan, ditunda publikasinya, maupun diubah sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapainya. Akibatnya, informasi yang disampaikan kepada pihak lain menjadi tidak mencerminkan nilai perusahaan yang sesungguhnya.

Pandangan terhadap *Earnings Management*

Sulistiyanto (2008) mengatakan bahwa ada perbedaan antara praktisi dengan akademisi terhadap manajemen laba. Perbedaan pandangan disebabkan perbedaan sudut pandang kedua pihak terhadap aktivitas rekayasa manajerial ini. Para praktisi menyebut manajemen laba sebagai masalah yang harus segera diselesaikan karena secara signifikan akan mempengaruhi laba perusahaan dan keputusan yang dibuat oleh para *stakeholder*. Sedangkan para akademisi

memiliki pendapat lain mengenai manajemen laba dimana para akademisi menilai manajemen laba bukan sebagai masalah yang berarti sebab aktivitas rekayasa manajerial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan, alasannya karena aktivitas rekayasa ini hanya merupakan dampak dari luasnya spektrum prinsip akuntansi berterima umum.

a. Manajemen laba sebagai kecurangan

Sulistyanto (2008) mengungkapkan sebagian pihak mempunyai pandangan bahwa manajemen laba menggambarkan perilaku tidak etis seorang manajer untuk menipu pihak lain dengan menggunakan informasi-informasi dalam laporan keuangan. Beberapa pihak menyatakan aktivitas rekayasa manajerial ini dianggap kecurangan apabila perusahaan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Mencatat penjualan sebelum dapat direalisasi

Aktivitas rekayasa ini dilakukan dengan cara mencatat penjualan sebelum dapat direalisasikan. Aktivitas seperti ini bertentangan dengan prinsip konservatisme akuntansi yang menyatakan bahwa suatu transaksi dapat diakui atau dicatat sebagai pendapatan apabila perusahaan dapat memastikan bahwa pendapatan itu kemungkinan besar dapat terealisasi dimasa depan. Sedangkan transaksi yang belum dapat dipastikan apakah dapat terealisasi dimasa depan, tidak diijinkan untuk diakui atau dicatat dalam laporan keuangan.

2. Mencatat penjualan fiktif

Aktivitas rekayasa ini dilakukan dengan mencatat penjualan fiktif. Dalam artian bahwa perusahaan memalsukan transaksi penjualan yang sebenarnya belum atau tidak pernah dilakukannya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan dengan cara mengakui dan mencatat transaksi-transaksi yang sebenarnya tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan sama sekali.

3. Mengundurkan tanggal bukti pembelian

Aktivitas rekayasa ini dilakukan dengan mengundurkan tanggal bukti

pembelian. Hal ini dilakukan untuk mengatur tingkat laba sesuai dengan yang diinginkan manajer. Jika pada suatu periode kinerja perusahaan lebih rendah dari kinerja yang ditargetkan maka perusahaan akan menunda pengakuan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian itu. Hal tersebut dilakukan supaya kinerja perusahaan tampak terlihat bagus dari periode ke periode meskipun sebenarnya dalam periode tertentu perusahaan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi.

4. Mencatat persediaan fiktif

Aktivitas rekayasa ini dilakukan dengan mencatat persediaan fiktif. Hal ini dilakukan agar nilai aktiva perusahaan menjadi lebih besar daripada nilai sesungguhnya. Upaya ini dilakukan agar perusahaan terlihat mempunyai aktiva lebih besar dibandingkan aktiva yang sesungguhnya sehingga akan meningkatkan kinerja solvabilitas perusahaan bersangkutan.

b. Manajemen laba bukan kecurangan

Sulistyanto (2008) mengungkapkan sementara pihak lain berpendapat bahwa manajemen laba bukanlah kecurangan yang dilakukan manajer. Apalagi jika aktivitas ini dilakukan manajer dalam kerangka prinsip akuntansi berterima umum. Prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa manajer harus mengungkapkan secara lengkap semua informasi dalam pelaporan keuangan juga tidak mampu membuat pemakai laporan keuangan mengetahui apakah perusahaan itu melakukan manajemen laba atau tidak. Seharusnya perusahaan mengungkapkan laba yang sesungguhnya diperoleh dari aktivitas-aktivitasnya, namun akuntansi memberi kesempatan perusahaan untuk secara konservatisme dan agresivisme dalam mengakui dan mencatat suatu transaksi yang dilakukan dan dialaminya. Berikut pengertian dari akuntansi konservatisme dan akuntansi agresivisme :

a. Akuntansi konservatif

Akuntansi konservatif adalah proses akuntansi untuk mengakui dan

mencatat suatu transaksi atau peristiwa secara berhati-hati sehingga perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dimasa depan. Untuk itu perusahaan akan menghemat atau membuat cadangan dengan mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa yang terjadi saat ini untuk dipakai dimasa depan pada saat diperlukan. Contohnya adalah mempercepat pengakuan provisi dan cadangan, melebihi - lebihkan nilai yang diperoleh dalam proses *R&D (Research and Development)* dalam pendapatan penjualan, dan membesar-besarkan biaya restrukturisasi dan penghapusan aktiva.

b. Akuntansi agresif

Akuntansi agresif adalah proses akuntansi untuk mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa secara eksploratif. Sebagai contoh adalah mengecilkan catatan provisi piutang tak tertagih dan menarik kebawah provisi dan cadangan. Secara konseptual kedua model akuntansi ini dapat membuat informasi laba dalam laporan keuangan menjadi lebih kecil atau lebih besar daripada laba sesungguhnya. Alasan inilah yang menjadi dasar dari pendapat yang menyatakan bahwa manajemen laba bukanlah tindakan rekayasa yang mengarah pada kecurangan.

Teknik *Earnings Management*

Tearney, dkk (2006) dalam Sulistiawan, dkk (2011) mengungkapkan bahwa teknik yang biasanya ditemukan dalam praktik manajemen laba dibagi kedalam lima teknik, antara lain sebagai berikut :

a. Mengubah metode akuntansi

Metode akuntansi merupakan pilihan-pilihan yang disediakan oleh standar akuntansi dalam menilai aset perusahaan. Pemilihan atas metode akuntansi tertentu akan memberikan *outcome* yang berbeda, baik bagi manajemen, pemilik, maupun pemerintah yang berdampak menimbulkan konflik kepentingan diantara ketiganya. Namun, pemilihan metode akuntansi tertentu yang dilakukan oleh manajer atau pengelola perusahaan merupakan salah satu bentuk maksimalisasi nilai perusahaan menurut perspektifnya masing-masing, sepanjang pemilihan tersebut sejalan

dengan rambu-rambu yang sudah diatur dalam SAK.

Contoh dari teknik ini adalah pemilihan metode penyusutan aset tetap antara garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun (*declining balance method*). Dalam kasus ini, manajer cenderung memilih menggunakan metode garis lurus dibandingkan saldo menurun, karena metode garis lurus akan menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan laba dari metode saldo menurun pada awal periode penyusutan. Metode garis lurus akan mengalokasikan biaya depresiasi dengan jumlah yang sama sepanjang masa manfaat, sedangkan metode saldo menurun akan membebankan biaya depresiasi yang lebih besar pada awal periode pembebanan.

b. Membuat estimasi akuntansi

Teknik ini dilakukan dengan tujuan memengaruhi laba akuntansi melalui kebijakan dalam membuat estimasi akuntansi. Beberapa bentuk estimasi akuntansi tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Estimasi dalam menentukan besarnya jumlah piutang tidak tertagih, baik dengan persentase penjualan maupun persentase piutang.
2. Estimasi dalam menentukan umur ekonomis aset, baik aset tetap maupun aset tidak berwujud.
3. Estimasi tingkat bunga pasar yang digunakan untuk mendiskonto arus kas pada masa mendatang untuk penilaian kewajaran aset yang tidak memiliki pembanding atau kewajaran nilai obligasi.

Cara untuk mendapatkan tambahan atau pengurangan laba adalah mengubah estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi ini disesuaikan dengan kebutuhan penyajian laporan keuangan. Jika mengharapkan kenaikan laba, perusahaan dapat mengubah estimasi aset tetap atau aset tidak berwujudnya menjadi lebih panjang. Hasilnya, laba menjadi lebih tinggi karena biaya penyusutan menurun.

c. Mengubah periode pengakuan pendapatan dan biaya

Teknik ini dilakukan untuk mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan dan biaya dengan cara menggeser pendapatan dan biaya ke periode berikutnya agar memperoleh laba maksimum. Manajer akan

mempercepat pengakuan pendapatan periode mendatang dengan melaporkannya ke periode tahun berjalan agar kinerja perusahaan pada tahun berjalan menjelang *IPO* terlihat baik atau menunjukkan laba maksimal. Contoh lainnya adalah mempercepat atau menunda periode pengakuan biaya penelitian dan pengembangan (*R&D*) ke periode berikutnya, mempercepat atau menunda periode pengakuan iklan, mempercepat atau menunda periode pengakuan pengiriman tagihan dan pengiriman produk ke vendor.

d. Mereklasifikasi akun

Permainan akuntansi dilakukan dengan memindahkan posisi akun dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi, sebenarnya laporan keuangan yang disajikan sudah sama, tetapi karena kelihaihan penyajinya, laporan keuangan ini bisa memberikan dampak interpretasi yang berbeda bagi penggunaannya. Dengan menggunakan strategi reklasifikasi, perusahaan itu mencatat diskon penjualan menjadi biaya pemasaran. Hasilnya memang tidak mengubah nilai akhir dalam laporan laba rugi. Namun jika diperhatikan, nilai labanya akan meningkat. Dan ini mengakibatkan memperbesar nilai penjualannya memberikan persepsi yang salah tentang kemampuan perusahaan dalam menjual barangnya.

Implikasi dari rekayasa seperti ini berdampak pada terjadinya kesalahan interpretasi laporan keuangan oleh pengguna, terutama yang tidak memiliki pengetahuan akuntansi. Meskipun laba rugi memberikan informasi lengkap, sampai saat ini banyak pengguna laporan keuangan cenderung hanya membaca bagian laba bersihnya.

e. Mereklasifikasi akrual diskroner dan akrual nondiskroner

Akrual diskroner (*discretionary accruals*) adalah akrual yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan manajemen, seperti pertimbangan tentang penentuan umur ekonomis aset tetap atau pertimbangan pemilihan metode depresiasi. Akrual nondiskroner (*nondiscretionary accruals*) adalah akrual yang dapat berubah bukan karena kebijakan atau pertimbangan pihak manajemen, seperti perubahan piutang yang besar karena adanya tambahan penjualan yang signifikan.

Sementara itu, akrual (*accruals*) adalah penjumlahan antara akrual diskroner dan akrual nondiskroner. Akrual merupakan perbedaan laba dengan arus kas operasi. Makin besar perbedaannya, maka perbedaan itu disebabkan karena aspek akrual atau kebijakan akuntansi. Laba dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi, sedangkan arus kas operasional hanya berasal dari transaksi kas riil. Makin tinggi nilai akrual menunjukkan adanya strategi menaikkan laba dan makin rendah nilai akrual menunjukkan adanya strategi menurunkan laba.

Pengukuran *Earnings management*

a. Discretionary accruals

Titik awal untuk mengukur adanya *discretionary accruals* diruntut dari total *accruals*. Beberapa model menggunakan asumsi bahwa proses timbulnya komponen *non-discretionary* berasal dari total *accruals*. Kebanyakan dari model-model yang ada, paling sedikit membutuhkan satu parameter yang diestimasi, dan ini biasanya diimplementasikan dalam suatu periode yang disebut “*estimation period*”, yang diharapkan tidak terdapat *systematic earnings management*. Model-model ini secara umum merupakan penyajian dari beberapa literatur yang membahas *earnings management* yang disajikan bersama-sama agar dapat dibandingkan.

Discretionary accruals yang digunakan sebagai proksi *earnings manajement* dalam penelitian ini merupakan modifikasi *cross sectional* dari model Jones, (1991), yang dapat mendeteksi *earnings manajement* secara konsisten (Sanjaya, 2008). Rumus yang digunakan untuk menentukan nilai total *accruals* untuk sampel perusahaan yang dipilih dengan pendekatan *cash flow* adalah sebagai berikut :

$$\text{Tait/Ait-1} = (\text{Nit} - \text{OCet})/\text{Ait-1}$$

Keterangan :

TAit : *Total Accruals* pada periode t

Ait-1 : Total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir periode t-1

Nit : Laba bersih operasi (*net operating income*) periode t
 OCFt : Aliran kas dari aktivitas operasi (*operating cash flow*) pada periode t

Setelah diperoleh nilai *total accruals*, dilakukan regresi untuk memperoleh angka koefisien 1, 2, dan 3 dengan variabel dependen *total accruals* dan variabel independen adalah total aset tahun sebelumnya (t-1), perubahan pendapatan, dan total aset tetap kotor perusahaan pada tahun ke-t. Setelah diperoleh nilai koefisien regresi 1, 2, dan 3, maka dilanjutkan dengan menghitung komponen *nondiscretionary accruals*. Model *nondiscretionary accruals* dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NDAit} = \alpha_1 (1/\text{Ait-1}) + \alpha_2 (\Delta\text{REVit}/\text{Ait-1}) + \alpha_3 (\text{PPEit}/\text{Ait-1}) + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

NDAit : *Nondiscretionary accruals* pada periode t.

Ait-1 : Total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir periode t-1.

ΔREVit : Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t.

ϵ_{it} : Sampel *error* perusahaan i pada periode t.

langkah selanjutnya adalah mencari nilai dari *descretionary accruals* dengan mengurangi Tait dengan nilai NDAit.

$$\text{DA} = \text{Tait} - \text{NDAit}$$

Keterangan :

Dait : *Descretionary accruals* perusahaan i pada tahun t.

Tait/Ait-1 : *Total Accruals* perusahaan i pada tahun t.

NDAit : *Nondiscretionary accruals* perusahaan i pada tahun t.

2.5 Profitabilitas

Pengertian profitabilitas

Husnan (2001), profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Agus, 2010).

Pengukuran profitabilitas

1. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien (Sawir, 2009:18).

Gross profit margin merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan sales. Semakin besar *Gross Profit Margin* semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales, demikian pula sebaliknya, semakin rendah *Gross Profit Margin* semakin kurang baik operasi perusahaan (Syamsuddin, *Gross Profit Margin* dihitung dengan formula :

$$\mathbf{Gross\ Profit\ Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi *Net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan. *Net profit margin* dihitung dengan rumus:

$$\mathbf{Net\ Profit\ Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

3. *Rentabilitas Ekonomi/ daya laba besar/ basic earning power*

Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan laba sebelum pajak terhadap total asset. Jadi rentabilitas ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan asset yang dimiliki untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau pendapatan atau dengan kata lain Rentabilitas Ekonomi menunjukkan kemampuan total aset dalam menghasilkan laba. Rentabilitas ekonomi mengukur efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang menunjukkan rentabilitas ekonomi perusahaan (Sawir, 2009:19). Rentabilitas Ekonomi dihitung dengan rumus:

$$\text{Rentabilitas Ekonomi} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

4. *Return on Investment*

Return on investment merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. *Return On Investment* adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan (Syamsuddin, 2009:63).

Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan suatu perusahaan. *Return on investment* merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila di ukur dari nilai aktiva (Syafri, 2008:63).

Return on Investment dihitung dengan rumus:

$$ROI = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Penilaian}}$$

Atau dapat juga dihitung dengan :

$$ROI = \text{Net profit margin} \times \text{Assets turn over}$$

5. *Return on Equity*

Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah

pajak dengan total ekuitas. *Return On Equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan (Syafri, 2008:305). *Return on equity* dapat dihitung dengan formula:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

6. *Earning per share* (EPS)

Earning Per Share adalah rasio yang menunjukkan berapa besar kemampuan perlembar saham dalam menghasilkan laba (Syafri, 2008:306).

Earning per share merupakan rasio yang menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa (Syamsuddin, 2009:66). Oleh karena itu pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat tertarik akan *Earning Per Share*. *Earning per share* adalah suatu indikator keberhasilan perusahaan. *Earning per share* dihitung dengan rumus:

$$\text{Earning per share} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Dividen saham Preferen}}{\text{Jumlah saham biasa yang beredar}}$$

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Return On Equity* (ROE) untuk memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sawir 2009:20).

Return on equity dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

2.6 Keputusan Pendanaan

2.7.1. Definisi Keputusan Pendanaan

Tujuan keputusan pendanaan adalah memperoleh dana dengan biaya yang paling murah. Pendanaan mencakup dana jangka pendek dan jangka panjang, dimana jangka pendek didefinisikan sebagai pendanaan yang kurang satu tahun sedangkan jangka panjang lebih dari satu periode bisnis (Hanafi, 2012). Marcus (2006) menyatakan bahwa tanggung jawab kedua manajer keuangan adalah menggalang dana yang dibutuhkan perusahaan untuk investasi dan operasinya. Keputusan pendanaan dan keputusan investasi (baik jangka panjang maupun jangka pendek) saling terkait dimana jumlah investasi menentukan jumlah dana yang harus diperoleh dan investor yang berkontribusi mendanai saat ini mengharapkan pengembalian investasi dimasa mendatang.

Pendekatan *Trade Off (Trade Off Theory)* menyatakan nilai perusahaan akan meningkat dengan meningkatnya nilai hutang tetapi nilai tersebut akan mulai menurun pada titik tertentu dimana pada titik tersebut tingkat hutang merupakan tingkat hutang optimal. Teori ini merupakan gabungan teori Modigliani dan Miller dengan memasukkan biaya kebangkrutan dan biaya keagenan sehingga mengidentifikasi *trade off* antara penghematan pajak dengan biaya kebangkrutan. Teori *pecking order* yang dikemukakan oleh Bradley, Myers dan Marcus (2006) secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan lebih menyukai pendanaan yang berasal dari hasil operasi perusahaan;
2. Perusahaan berusaha menyesuaikan rasio pembagian deviden yang ditargetkan dengan berusaha untuk menghindari perubahan pembayaran deviden secara drastis;
3. Kebijakan deviden yang kaku, ditambah dengan tingkat fluktuasi keuntungan dan peluang investasi tidak dapat diprediksi menunjukkan arus kas yang dihasilkan secara internal dapat lebih atau kurang dari pengeluaran investasi.
4. Jika pendanaan dari luar diperlukan maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dulu. Perusahaan akan memulai dengan hutang, kemudian surat campuran seperti obligasi konvertibel kemudian saham sebagai pilihan terakhir.

Pengukuran Keputusan Pendanaan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Debt to Equity Ratio* karena rasio ini menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan mendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas (Brigham, 1999:87).

Debt to Equity Ratio (DER) dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.7 Kepemilikan Manajerial

2.7.2. Pengertian Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, Josua dan Yulius Yogi Christiawan, 2007: 2). Wahidahwati (2002: 607) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya direktur, manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer perusahaan merangkap jabatan sebagai manajemen perusahaan sekaligus pemegang saham yang turut aktif dalam pengambilan keputusan.

2.7.3. Pengukuran kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam persentase. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri (Putu Anom Mahadwartha, 2003: 3). Proksi kepemilikan manajerial adalah dengan menggunakan persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan direktur terhadap total saham yang beredar (Chen dan Steiner melalui Kartika Nuringsih, 2005: 108). Kepemilikan manajerial dihitung dengan

rumus sebagai berikut (Kartika Nuringsih, 2005 : 113)

$$\text{KM} = \frac{\text{Jumlah saham direksi, komisaris, dan manajer}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

2.8 *Sustainability Reporting*

2.10.1 *Pengertian Sustainability Reporting*

Sustainability reporting adalah pelaporan yang dilakukan oleh untuk mengukur, mengungkapkan (*disclose*), serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. *Sustainable reporting*, juga dapat didefinisikan suatu laporan yang bersifat non-finansial yang dapat dipakai sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan (Arief Effendi, 2016 : 2).

2.10.2 *Proses Penyajian Sustainability Reporting*

Proses penyajian *sustainability reporting* dilakukan melalui 5 (lima) mekanisme, yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan yang berkelanjutan (*sustainability development*), kemudian mempublikasikan kebijakan tersebut beserta dampaknya.
2. Tekanan pada rantai pemasok (*supply chain*). Harapan masyarakat pada perusahaan untuk memberikan produk dan jasa yang ramah lingkungan juga memberikan tekanan pada perusahaan untuk menetapkan standar kinerja dan *sustainability reporting* kepada para pemasok dan mata rantainya.
3. Keterlibatan pemangku kepentingan.
4. *Voluntary codes* dalam mekanisme ini, masyarakat meminta perusahaan untuk mengembangkan aspek-aspek kinerja *sustainability* dan meminta perusahaan untuk membuat laporan pelaksanaan *sustainability*. Apabila perusahaan belum melaksanakan, maka perusahaan harus memberikan penjelasan.
5. Mekanisme lain adalah *rating* dan *benchmarking*, pajak dan subsidi, izin-izin yang dapat diperdagangkan, serta kewajiban dan larangan.

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) dapat diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan (*annual report*). Beberapa alasan perusahaan menyajikan laporan berkelanjutan terpisah dari laporan tahunan, antara lain sebagai berikut :

1. Laporan keberlanjutan sebagai alat komunikasi bagi manajemen dengan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pesan bahwa perusahaan telah menjalankan pengembangan yang berkelanjutan.
2. Memperoleh *positif image* (citra perusahaan) dari pemangku kepentingan.
3. Pencarian legitimasi dari pemangku kepentingan.

2.10.3. Implementasi Sustainability Reporting

Global Reporting Initiative (GRI) telah mengeluarkan panduan/pedoman yang dapat digunakan untuk mengukur praktik manajemen keberlanjutan (*sustainability management*) berupa *GRI Sustainability Reporting Guidelines* dengan menunjukkan beberapa elemen penting yang berhubungan dengan 3 (tiga) aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, dan manusia atau *triple bottom line (profit, planet, and people)*. *Global Reporting Initiative and Value Guidelines*. New York Stock Exchange (NYSE) di Amerika Serikat telah memiliki Dwo Jones *Sustainability Index (DJSI)* sejak tahun 1999, yang telah memasukkan nilai *corporate sustainability* untuk saham-saham perusahaan dengan salah satu kriterianya adalah praktik CSR.

Dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu bersifat dari luar perusahaan (*external drivers*) dan dari dalam perusahaan (*internal drivers*). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KHL) telah memberlakukan audit Proper (Program penilaian peningkatan kinerja perusahaan). Pendorong dari dalam perusahaan terutama bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan, termasuk tingkat kepedulian/tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar (*community development responsibility*).

Perusahaan yang telah *go public* memiliki kewajiban membuat laporan keberlanjutan sesuai dengan amanat Pasal 66 ayat 2, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa

Keuangan) telah mengeluarkan aturan yang mengharuskan perusahaan publik untuk mengungkapkan pelaksanaan kegiatan CSR di dalam laporan keuangan tahunannya. Melalui penerapan *sustainability reporting* diharapkan perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan (*sustainable growth*) yang didasarkan atas etika bisnis (*business ethics*).

2.10.4. Sustainability Management

Pada awal abad ke-21, terdapat pergeseran dalam berbisnis yang beretika melalui konsep pengembangan yang berkelanjutan sebagai pradikman baru. Pada awalnya, bisnis hanya dibangun dengan pradikma lama berupa *Single Paliat Profil* saja. Konsep pengembangan yang berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan di mana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia saat ini (*current*) tidak boleh menanggung kemampuan generasi berikutnya (*next generation*) dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang akan datang. Berdasarkan konsep tersebut, maka muncul konsep *sustainability management* (manajemen keberlanjutan). Manfaat yang diperoleh oleh perusahaan yang mengimplementasikan *sustainability management* adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan lebih peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dalam pembangunan komunitas (*community development*) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan bukan hanya mengejar keuntungan bagi pemilik semata, namun juga harus menjaga dan memberi nilai tambah (*value added*) pada masyarakat dan lingkungannya.
2. Meningkatkan nama baik/reputasi perusahaan, sehingga terjaga citra (*image*) yang positif.
3. Mengurangi timbulnya dampak risiko yang berpotensi merugikan perusahaan.
4. Meningkatkan daya asing (*competitive advantage*) perusahaan di tingkat global.
5. Meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
6. Bahan analisis investasi bagi para investor (*socially Responsible Investment-SRI*).

2.10.5. Pengukuran *Sustainability Reporting*

Sustainability reporting diukur dengan skala pengukuran rasio. Variabel ini diukur melalui *Sustainability report disclosure index (SRDI)* Perhitungan *SRDI* dilakukan dengan memberikan skor 1 jika satu item diungkapkan, dan 0 jika tidak diungkapkan. Setelah dilakukan pemberian skor pada seluruh item, skor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan *SRDI* adalah:

$$SRDI = \frac{V}{M}$$

Keterangan :

SRDI : *Sustainability Reporting Disclosure Index*

V : Jumlah item yang diungkapkan perusahaan

M : Jumlah item yang diharapkan

2.9 *Good Corporate Governance*

2.9.1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Pengertian *corporate governance* menurut Turnbull Report di Inggris (April 1999) yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma adalah sebagai berikut :

"Corporate governance is a company's system of internal control has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company's assets and enhancing over time the value of the shareholders investment".

Berdasarkan pengertian diatas, *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. (Arief Effendi, 2016 : 2)

Menurut Bank Dunia (*World Bank*), pengertian *good corporate governance (GCG)* adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk

berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. (Arief Effendi, 2016 : 2)

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), (2001:2), *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai "seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Sesuai Pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, secara singkat tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. *Corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional (BTP). Menurut Bank Dunia (World Bank), pengertian *good corporate governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. (Arief Effendi, 2016 : 2)

2.9.2. Tujuan Corporate Governance

Tujuan *Corporate Governance* secara umum adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, yang secara tegas oleh global *Corporate governance* adalah menjadi sebuah isu penting dunia. Organisasi mempunyai peran kunci untuk bermain dalam peningkatan pengembangan

ekonomi sosial. *Good Governance* adalah mesinnya pertumbuhan global, pertanggung jawaban penyedia kerja, pelayanan publik dan privat, pengadaan barang dan jasa serta infrastruktur. Sekarang ini, efisiensi akan pertanggung jawaban organisasi tidak peduli apakah organisasi publik atau privat. *Good governance* telah menjadi agenda pokok internasional.

The Indonesian institute for corporate governance (IICG) mengungkapkan tujuan dari *Good corporate governance*:

- a. Meraih kembali kepercayaan investor dan kreditor nasional serta internasional.
- b. Memenuhi tuntutan standar global.
- c. Meminimalkan biaya kerugian dan biaya pencegahan atas penyalahgunaan wewenang pengelolaan.
- d. Meminimalkan *cost of capital* dengan menekan resiko yang dihadapi kreditor.
- e. Meningkatkan nilai saham perusahaan.
- f. Mengangkat citra perusahaan di mata publik.

293. Prinsip-prinsip Corporate Governance

Menurut Effendi (2016: 11-14) Prinsip-prinsip *corporate governance* biasanya dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (responsibilitas), *Independency* (independensi), dan *Fairness* (kesetaraan). Berikut penjelasan singkat dari masing-masing prinsip *corporate governance*.

a. Prinsip Transparansi

Transparansi (*transparency*) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat dipertimbangkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengungkapan informasi tidak terbatas pada informasi material tentang :

a. Keuangan dan hasil operasi perusahaan

Laporan keuangan yang sudah diaudit adalah sumber informasi yang berguna untuk memonitor kinerja keuangan dan menjadi dasar untuk menilai asset sekuritas. Para manajer dan pengambil keputusan sering berdiskusi dengan menggunakan bahwa dari laporan keuangan.

Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan secara benar akan sangat bermanfaat.

b. Tujuan-tujuan perusahaan

Tujuan perusahaan harus disosialisasikan kepada lingkungan bisnis dan masyarakat umum. Investor dan pengguna lainnya terkadang melihat tujuan perusahaan untuk tujuan evaluasi antara operasi perusahaan dan langkah-langkah apa yang diambil perusahaan untuk mencapai tujuannya.

c. Kepemilikan saham mayoritas dan hak-hak suara dengan adanya keterbukaan, para investor mendapatkan informasi yang berhubungan dengan hak-hak mereka sebagai pemilik saham. Hak-hak tersebut adalah seperti hak memiliki saham secara aman, hak untuk memperoleh informasi sejelas-jelasnya, hak suara, hak ikut serta dalam pembuatan keputusan, hak-hak voting khusus, hak ikut serta dalam pembuatan keputusan mengenai perdagangan atau modifikasi asset bersama.

d. Anggota dewan komisaris serta penghasilan.

Dasar membutuhkan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja dan kualifikasi anggota dewan serta mengukur seberapa besar potensi konflik kepentingan akan mempengaruhi keputusan mereka. Pengungkapan gaji dewan eksekutif adalah untuk mengukur biaya dan manfaat dari rencana gaji tersebut, serta kontribusi apa yang didapat dari tunjangan seperti *stock option*.

e. Faktor-faktor risiko akan datang, yang material informasi yang penting lainnya adalah tentang risiko yang sekiranya sekiranya dapat diduga dari informasi yang didapatkan, seperti risiko tingkat bunga, ketergantungan atas komositas tertentu, risiko transaksi derivative, dan transaksi *off balance sheet*, serta risiko kerusakan lingkungan hidup.

f. Isu-isu yang berhubungan dengan para karyawan dan pihak yang berkepentingan lainnya. Para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan merupakan aset perusahaan yang harus dijaga sehingga isu yang berkaitan dengan karyawan haruslah diungkapkan.

g. Struktur dan kebijakan *governance* perusahaan di sini lebih ditentukan bagaimana usaha perusahaan dalam mewujudkan *good corporate governance*.

2. Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas yang tinggi di bidang akuntansi, pengungkapan dana non – keuangan, serta audit.
3. Pemeriksaan tahunan harus dilaksanakan oleh auditor independen untuk menyediakan jaminan keyakinan eksternal yang objektif tentang cara penyajian dan penyajian laporan keuangan.
4. Jalur penyeberangan informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya agar informasi yang dihasilkan relevan.

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggung jawabkan seras mendukung usaha untuk menjamin menyeimbangkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap manajemen mengenai kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan bagi pemegang saham. Supaya prinsip akuntabilitas ini efektif, maka harus dijaga independensinya dari pengaruh manajemen.

Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian di dalam perseroan harus menyadari tanggung jawab pada soal pemegang saham menggunakan hak suara mereka atau dengan cara lain. Campur tangan dalam manajemen perseroan yang melanggar hukum harus ditanggulangi dengan cara meningkatkan keterbukaan perseroan dan akuntabilitas manajemen perseroan, serta pada akhirnya harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku.

Perusahaan senantiasa menjaga berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas antar-organ

perusahaan serta mengurangi dampak dari yang timbul akibat perdebatan kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas individual

Akuntabilitas individu merujuk kepada hubungan akuntabilitas dalam konteks atasan-bawahan. Akuntabilitas berlaku kepada kedua belah pihak, baik yang mempunyai wewenang dan yang mendapatkan penugasan dari pemegang wewenang.

2. Akuntabilitas tim

Akuntabilitas tim merujuk kepada adanya akuntabilitas yang ditanggung bersama oleh suatu kelompok kerja atas kondisi dari kinerja yang tercapai.

3. Akuntabilitas Korporasi

Akuntabilitas korporasi merujuk kepada akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan perannya sebagai entitas bisnis. Dalam hal ini perusahaan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukannya.

c. Prinsip responsibilitas

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

d. Prinsip independensi

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Sehingga organ perusahaan tidak boleh ada ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

e. Prinsip kesetaraan

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula, sesuai ketentuan berikut :

1. Di kelas manapun, semua pemegang saham harus memiliki hak suara yang sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak suara yang melekat pada semua kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam hak-hak suara harus mendapat persetujuan pemegang saham.
2. Suara harus disampaikan oleh para custodian atau *hominoes* dengan cara yang disetujui oleh pemilik saham.
3. Proses dan prosedur Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) harus memungkinkan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham. Prosedur perusahaan tidak boleh mempersulit atau membutuhkan biaya mahal untuk menyampaikan suara.
4. Transaksi organ dalam (*insider trading*) dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan orang dalam sendiri harus dilarang.

Anggota dewan komisaris dan direksi serta para manajer harus mengungkapkan setiap kepentingan yang bersifat hutang atas transaksi atau hak-hak yang berpengaruh terhadap perusahaan

294. Mekanisme GCG

Pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) itu sendiri dapat diartikan secara luas pada literatur yang ada dan terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara manajer, direktur, auditor dan pemegang saham, sedangkan secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang meningkatkan perusahaan menarik modal masuk, memiliki kinerja yang efisien, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. Keberadaan organ-organ tambahan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance*. Organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG (Agoes, 2011:109), yaitu :

1. Ukuran Dewan Komisaris
2. Dewan Komisaris Independen
3. Kepemilikan Institusional
4. Kepemilikan Manajerial
5. Komite Audit

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan komisaris independen untuk memproksikan mekanisme penerapan good corporate governance. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain. (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.

Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku opportunistic manajer yang dapat mengurangi agency cost yang diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Menurut Shleifer dan Vishny (dalam Tendi Haruman, 2008), jumlah pemegang saham yang besar (large shareholders) mempunyai arti penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka para pemegang saham besar seperti kepemilikan oleh institusional akan dapat memonitor tim manajemen secara lebih efektif dan nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Tingginya kepemilikan oleh institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan yang tinggi ini akan meminimalisasi tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, pemilik institusional akan berusaha melakukan usaha-usaha positif guna meningkatkan nilai perusahaan miliknya. Hal ini konsisten dengan Lins (2002) yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan pada pihak luar perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional diukur sesuai presentase kepemilikan sahan oleh institusi perusahaan (Tedi Haruman, 2008). Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus :

$$KInst = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki investor instansi}}{\text{Total modal saham perusahaan yang beredar}}$$

2. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) pada 30 Mei 2002, antara lain disebutkan bahwa :

1. Rekomendasi utama dalam pedoman ini tentang pembentukan komite audit adalah :
 - a. Dewan Komisaris harus membentuk suatu komite audit;
 - b. Harus ada ketentuan – ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit;
 - c. Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan control internal;
 - d. Anggota komite audit harus diangkat dari anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas :
 - 1) Paling sedikit tiga anggota; dan
 - 2) Mayoritas harus independen.
2. Tujuan dibentuknya komite audit adalah :
 - a. Pelaporan keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama

atas laporan keuangan dan ausitor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.

b. Manajemen resiko dan control

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan control, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan control.

c. Tata kelola perusahaan

Meski direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

3. Tanggung jawab komite audit dibidang tata kelola perusahaan adalah memberikan kepastian, bahwa perusahaan tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan urusannya dengan pantas dan mempertahankan urusan dengan pantas dan mempertahankan control efektif terhadap konflik kepentingan (*conflik of interest*) dan manipulasi terhadap pegawainya. Dalam hal tata kelola perusahaan, peran dan tanggung jawab komite audit harus termasuk juga :

- a. Mengawasi proses tata kelola perusahaan;
- b. Memastikan bahwa manajemen senior membudayakan tata kelola perusahaan ;
- c. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada code of conduct;
- d. Mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat memengaruhi kinerja financial atau non-finansial perusahaan;
- e. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- f. Mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan tata kelola perusahaan dan temuan lainnya.

Menurut Komite Nasional *Good Corporate Governance* (2002), hubungan kerja komite audit dengan auditor internal, antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan rekomendasi terhadap pengangkatan dan/atau penggantian kepala auditor internal yang ditunjuk oleh direktur utama.
2. Meninjau piagam audit internal (*internal audit charter*)
3. Meninjau struktur fungsi audit internal.
4. Meninjau rencana tahunan audit intern.
5. Memastikan bahwa fungsi audit internal mempunyai metodologi, alat, dan sumber yang memadai untuk memenuhi piagam audit internal dan mengerjakan rencana tahunan audit intern.
6. Meninjau semua laporan audit internal.
7. Memonitor kinerja fungsi audit internal, dan
8. Memastikan bahwa fungsi audit internal memenuhi standar professional yang bersangkutan.

Komite audit memegang peran cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance* (GCG) Karen merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi, transparansi dan pengungkapan, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit.

a. Prinsip independensi komite audit

Komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Selain itu, anggota komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis apa pun dengan perusahaan maupun hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan komisaris perusahaan, sehingga terhindar dari konflik kepentingan. Oleh karena itu, nama-nama anggota komite audit (terutama di perusahaan publik) hendaknya diumumkan ke masyarakat atau publik sebagai wujud akuntabilitas terhadap sikap independensi mereka. Hal ini penting agar masyarakat dapat melakukan control serta penilaian terhadap para anggota komite audit tersebut.

b. Prinsip transparansi komite audit

Prinsip ini ditunjukkan melalui piagam komite audit, program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodik yang didokumentasikan dalam notulen rapat. Komite audit hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kerjanya sebagai wujud pengungkapan.

c. Prinsip akuntabilitas komite audit

Prinsip ini ditujukan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit. Selain itu, komite audit seharusnya memiliki kapabilitas, kompetensi, dan pengalaman di bidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja secara profesional.

d. Prinsip pertanggung jawaban komite audit

Prinsip ini ditujukan oleh aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, kinerja komite audit hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada publik, selain kepada dewan komisaris.

e. Prinsip kewajaran komite audit

Prinsip ini ditunjukkan oleh sikap komite audit dalam pengambilan keputusan yang didasarkan atas sikap adil dan objektif terhadap semua pihak.

Mengingat sangat pentingnya aspek manajemen risiko dalam pengelolaan perusahaan, maka komite audit diharapkan dapat melakukan identifikasi risiko potensial yang dihadapi perusahaan serta alternative pemecahannya. Selain itu yang tidak kalah penting adalah bahwa komite audit juga berkewajiban untuk menjaga tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan atau peraturan yang berlaku.

Proporsi komite audit dapat dihitung dengan cara :

$$KA = \frac{\text{Jumlah Anggota Audit dari luar Perusahaan}}{\text{Jumlah seluruh anggota komite audit}}$$

3. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi

dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), 2004). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan dewan komisaris Emiten atau Peraturan Publik, pada Pasal 20 mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris, paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang atau anggota dewan komisaris.
2. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah komisaris independen.
3. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
4. Satu (1) diantara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 Peraturan OJK tersebut, komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bukan merupakan organ yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengungkapan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya.

2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Komisaris independen hendaknya dapat berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) *potensi penyimpangan ataupun kecurangan (fraud)* diperusahaan publik, karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit. Komisaris independen dapat mengambil langkah-langkah pemecahan kecurangan atau usulan perbaikan system, tentu saja tetap dalam kerangka kerja sebagai komisaris. Kapabilitas komisaris independen dalam memberdayakan komite audit yang dipimpinnya merupakan faktor kunci sukses (*key success factor*) yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang diembannya.

Dirumuskan sebagai berikut :

$$K_{Ind} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Seluruh Anggota dewan komisaris perusahaan}}$$

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh *Earnings Management* terhadap Nilai Perusahaan

Manajer melakukan manajemen laba sebagai salah satu strategi atau taktik untuk meningkatkan nilai perusahaan. Biasanya hal ini terjadi sebelum penawaran saham perdana (IPO) agar investor berminat membeli sahamnya. Tetapi, nilai perusahaan yang tinggi ini tidak bisa bertahan lama, biasanya akan menurun lagi pada saat periode setelah IPO (Ernawati, 2012).

H1 : *Earnings Management* Berpengaruh Negatif terhadap Nilai Perusahaan.

2.10.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap hubungan *Earnings Management* dengan Nilai Perusahaan

Kepemilikan institusional adalah proposi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Permanasari, 2010). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal, 2004).

Kepemilikan saham yang besar oleh pihak institusional merupakan salah satu mekanisme untuk mengawasi kinerja manajemen, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pengawasan tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Purwaningtyas, 2011:66). Kepemilikan saham institusi yang tinggi menurut Subhan (2012) diharapkan dapat menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat merugikan semua pihak.

Menurut Boediono (2005), tingkat kepemilikan saham oleh institusi yang tinggi diharapkan dapat menimbulkan pengawasan yang lebih besar sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat merugikan semua pihak. Menurut Melinda (2008) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan. Temuan ini sejalan dengan temuan Nuriana (2012), yaitu bahwa kepemilikan

institusional Berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Agency cost* dipercaya dapat dikurangi melalui peningkatan kepemilikan institusional dalam perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin efektif pengawasan pemegang saham pada perusahaan untuk mengurangi *agency cost* dan meningkatkan kinerja keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat di ajukan adalah sebagai berikut :

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap hubungan *Earnings Management* dengan Nilai Perusahaan.

2.10.3. Pengaruh Komite Audit terhadap hubungan *Earnings Management* dengan Nilai Perusahaan.

Komite Audit adalah yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Komite audit mempunyai fungsi yaitu membantu Dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan yang membentuk komite audit Independen melaporkan laba dengan kandungan akrual deskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen.

Sam'ani (2008) mengatakan dalam penelitiannya bahwa komite audit mempunyai peran penting dan strategis dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta melaksanakannya Good corporate governance. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat di minimalisasi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat di ajukan adalah sebagai berikut:

H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap hubungan *Earnings Management* dengan Nilai Perusahaan.

2.10.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap hubungan *Earnings Management* dengan Nilai Perusahaan.

Dewan komisaris secara umum bertanggung jawab mengevaluasi kualitas informasi laporan keuangan. Hal tersebut penting dalam rangka meminimalkan perilaku opportunistik manajemen. Dewan komisaris memiliki akses informasi perusahaan namun tidak memiliki otoritas dalam perusahaan. Dalam struktur dewan komisaris dikenal adanya komisaris independen. Keberadaan komisaris independen dalam struktur dewan komisaris merupakan mekanisme penyeimbang dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan tanggung jawab dewan komisaris itu sendiri sebagai pengawas kualitas laporan keuangan.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance (KNKG, 2006). Coller dan Gregory (dalam Hadi dan Sabeni, 2002). Dewan komisaris merupakan inti dari good corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Hasil penelitian Nugrahani dan Nugroho (2010) dan Manik (2011) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut berarti makin besar ukuran dewan komisaris maka lebih mampu mengurangi indikasi kinerja manajemen daripada jumlah komisaris yang sedikit. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H4 : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap hubungan *Earnings Management* dengan Nilai Perusahaan.

2.11 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

